

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

PENELITIAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di semua kantor desa yang berada di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling* dimana seluruh desa di Kecamatan Wadaslintang sebanyak 16 desa dijadikan sampel, dari 16 desa yang dijadikan sampel penelitian terdapat 94 data responden yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi kapasitas yang dimiliki aparatur desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan keuangan desa yang semakin baik. Adanya kemampuan, pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelolaa keuangan desa mampu mendorong peningkatan dalam pengelolaan keuangan desa untuk lebih baik.

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi ketaatan terhadap regulasi yang diberikan oleh aparatur desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan keuangan desa yang semakin baik. Ketaatan yang diberikan oleh aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 akan mempermudah tercapainya asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta asas tertib dan disiplin anggaran.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD maka akan berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan keuangan desa yang semakin baik. Adanya penyusunan jadwal pengawasan yang rutin dan dilakukan sesuai dengan program, BPD aktif dalam melakukan evaluasi, perbaikan dan penilaian terhadap kegiatan dan program desa dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran keuangan desa, sehingga kinerja pengelolaan keuangan desa bisa tepat sasaran dan kebutuhan desa dapat terpenuhi.

Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diterima. Hal

tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang semakin terpenuhi dalam sebuah desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan keuangan desa yang semakin baik. Ketersediaan komputer dan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan yang lebih detail dan dapat meminimalisir kesalahan penyajian. Adanya jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah oleh aparatur desa dapat digunakan untuk mempermudah dalam berbagi informasi pada penggunaan keuangan desa baik dari pihak internal desa, pemerintah daerah, dan juga masyarakat.

Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ditolak. Hal tersebut menjelaskan bahwa komitmen dari aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Diperlukan adanya dukungan dari organisasi melalui pemberian perhatian berupa *reward* atas pekerjaan atau prestasi yang sudah dilaksanakan, serta dukungan berupa kelancaran arus dana desa sebagai sumber pendapatan desa. Selain itu, komitmen merupakan sebuah keinginan diperlukan adanya tindakan dari aparatur desa sehingga pekerjaan yang dilakukan bisa tepat sasaran.

Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa peran pendamping desa dalam sebuah pemerintahan desa memiliki kontribusi yang banyak terhadap keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa. Pendamping desa memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya kewenangan

dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa. Melihat kewenangan pendamping desa dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peranan yang krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa secara signifikan, faktor tersebut diantaranya kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pendamping desa. Hal tersebut menggambarkan bahwa tercapainya kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik sangat diperlukan adanya keempat faktor tersebut. Sesuai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa khususnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Melihat kapasitas aparatur desa, pengawasan BPD, pemanfaatan teknologi informasi, dan pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa perlu melakukan peningkatan kualitas pada keempat faktor tersebut. Peningkatan kapasitas aparatur desa dapat dilakukan melalui penambahan intensitas pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa dan perekrutan aparatur desa dengan pemenuhan kualifikasi yang memadai, sehingga aparatur desa mempunyai

kamampuan, pemahaman dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Peningkatan kualitas pengawasan BPD dapat dilakukan dengan cara penyusunan jadwal rutin pengawasan, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan program dan dilakukan secara bertahap, BPD aktif dalam melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan dalam kegiatan dan program, dan BPD selalu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan program desa.

Teknologi informasi merupakan faktor krusial di era globalisasi, dimana semua organisasi termasuk pemerintah desa harus memanfaatkannya guna menunjang pekerjaan pemerintah desa. Penguatan jaringan internet merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa guna meningkatkan mobilisasi kebutuhan informasi keuangan desa baik antar aparatur desa, pemerintah desa dengan pemerintah daerah, maupun pemerintah desa dengan masyarakat. Selain itu, pemenuhan jumlah komputer dalam pemerintah desa sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran pembuatan laporan keuangan dan kebutuhan keterbukaan informasi keuangan di internet, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pendamping desa memiliki peran yang penting dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Tugas yang diberikan kepada pendamping desa meliputi semua aspek dalam pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa,

sehingga diperlukan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa harus tepat sasaran, pendamping desa sering melakukan pelatihan guna penambahan *skill* aparatur desa, melakukan pengawasan dan penilaian secara periodik serta melakukan teguran dan saran perbaikan.

C. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa dan metode penelitian yang digunakan yaitu kuesioner dimana masih sedikit yang melakukan penelitian terkait, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih banyak agar hasil penelitian ini semakin kuat.
2. Sampel penelitian ini dilakukan dalam lingkup satu wilayah kecamatan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil beberapa wilayah kecamatan lain supaya dapat digeneralisasi dalam lingkup wilayah yang lebih luas.
3. Dimensi pada variabel pendamping desa dalam penelitian ini belum melibatkan peranya terhadap peningkatan partisipasi dari masyarakat.
4. Kompleksnya tugas aparatur desa dan keterbatasan waktu penelitian menyebabkan jawaban yang diberikan aparatur desa selaku responden dalam penelitian ini tidak bisa dikontrol secara pasti apakah jawaban responden jujur atau tidak.

D. Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya terkait kinerja pengelolaan keuangan desa diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan cakupan wilayah yang lebih luas untuk sampel penelitian, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan atau mengganti variabel bebas lainnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa seperti partisipasi masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara dalam pengambilan data penelitian, sehingga data yang didapatkan lebih detail.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan dimensi peningkatan partisipatif masyarakat dalam variabel pendamping desa yang merupakan salah satu tujuan dari pendamping desa.